

ABSTRAK

ROSLINA SARI PASARIBU

Badan Kepegawaian Daerah merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kepada walikota selaku wakil pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama/sekertaris daerah oleh walikota dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2023/PT.TUN.MKS, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Disimpulkan bahwa prosedur pemberhentian Sekretaris Daerah dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah melakukan suatu pelanggaran disiplin berat maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberikan hak pensiunnya dengan syarat bahwa pemberhentiannya sudah mencapai pada usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja minimal selama 20 (dua puluh) tahun, Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan

Kata Kunci : Sengketa, Keputusan, Walikota

ABSTRACT

ROSLINA SARI PASARIBU

The Regional Personnel Agency is a government agency tasked with implementing regional policies in the field of personnel and can be assigned to implement the implementation delegated by the government to the mayor as the representative of the government in the context of deconcentration.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

The legal provisions for the dismissal of high-ranking officials/regional secretaries by the mayor are in Article 12 of the Decree of the Minister of Home Affairs concerning the Procedures for Consultation on the Appointment and Dismissal of Provincial Regional Secretaries, Regency/City Regional Secretaries and Echelon II Structural Officials within the Regency/City Government. According to the Supreme Court, there are sufficient reasons to grant the cassation application without needing to consider other reasons for the cassation, therefore the Decision of the Makassar High State Administrative Court Number 163/B/2023/PT.TUN.MKS, which upholds the Decision of the Kendari State Administrative Court Number 30/G/2023/PTUN.KDI, cannot be upheld and must be canceled.

It is concluded that the procedure for dismissing the Regional Secretary in Article 12 of the Decree of the Minister of Home Affairs who has committed a serious disciplinary violation is to be honorably dismissed not at his own request and given his pension rights on the condition that his dismissal has reached the age of 50 (fifty) years and a minimum service period of 20 (twenty) years, the Panel of Supreme Court Justices has read and studied the Response to the Cassation Memo, but no matters were found that could weaken the cassation reasons of the Cassation Applicant. With the cassation application being granted, and as the losing party the Cassation Respondent was sentenced to pay court costs at all levels of court

Keywords: Dispute, Decision, Mayor